

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan perekonomian di Indonesia diikuti dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal ini, perbankan memiliki peranan yang sangat penting. Perbankan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan suatu negara. Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utama untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Kamsir, 2012:5).

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam hal ini, bank berfungsi untuk menjembatani kedua kelompok masyarakat yang saling membutuhkan. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menyimpan uang mereka dalam bentuk tabungan, deposito atau giro pada bank, sedangkan masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya dapat memperoleh pinjaman dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh bank.

Bank mendapatkan pendapatan terbesar dari bunga, imbalan, atau pembagian hasil usaha atas kredit yang disalurkan. Semakin banyak jumlah kredit

yang disalurkan berarti potensi pendapatan semakin besar. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak semua dana yang dihimpun dari masyarakat bisa disalurkan dengan baik sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Penyaluran kredit kepada masyarakat biasanya mengalami hambatan dalam hal pengembalian pinjaman kepada pihak bank dan nyaris semua bank yang beroperasi di Indonesia mengalami kredit bermasalah (Hariyani, 2010;5).

Kredit bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas *term of leanding* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga atau ada potensi loss (Hariyani, 2010:31). Kredit bermasalah akan memberikan dampak yang kurang baik dan dirasakan oleh negara, masyarakat, dan perbankan. Resiko yang timbul dari kredit bermasalah yaitu tidak adanya pengembalian atau pembayaran kembali kredit yang salurkan, baik sebagian atau seluruhnya. Semakin tingginya risiko kredit bermasalah yang dihadapi membuat semakin menurun tingkat kesehatan bank tersebut, maka diperlukannya pencegahan dalam penanganan kredit bermasalah. Salah satu cara agar kredit bermasalah dapat diatasi adalah dengan adanya suatu pengendalian internal yang baik dalam hal pemberian kredit. Suatu pengendalian internal yang baik dalam pemberian kredit, oleh karena itu untuk menghindari dan meminimalisir kredit bermasalah maka diperlukannya pengendalian internal yang baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tersebut (Hasanuddin, 2012;9).

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan atau prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi, serta memastikan bahwa semua ketentuan dan peraturan hukum ataupun undang-undang serta kebijakan manajemen telah dijalankan atau dipatuhi sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Herry, 2014:12).

Dengan adanya pengendalian internal yang baik pada bank diharapkan dapat mengukur apakah bank telah melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan aturan dan tidak menyimpang sehingga tujuan organisasi tercapai dengan baik. Dengan pengendalian yang baik diharapkan kredit bermasalah yang disebabkan faktor eksternal maupun internal dapat diminimalisir sehingga tujuan bank tercapai, baik dalam pengembangan maupun target yang telah ditetapkan. Selain itu, pencegahan atas permasalahan yang disebabkan oleh bank maupun nasabah juga dapat dihindari (Norman, 2013:20).

Menurut COSO (2013) pengendalian internal adalah sebuah proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan terkait operasional, pelaporan dan kepatuhan terhadap aturan. Dalam Internal Control-Integrated Framework (ICIF) terdapat lima komponen pengendalian internal, yaitu :

1. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian).
2. *Risk Assesment* (Penaksiran Risiko).
3. *Control Activities* (Kegiatan Pengendalian)

4. *Information and Communication* (Informasi dan Komunikasi)

5. *Monitoring* (Pemantauan)

Bank Mandiri adalah bank milik pemerintah dimana akte pendirian maupun modal dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Dalam mencapai tujuannya, Bank Mandiri melakukan strategi yang umumnya dilakukan oleh bank lain yaitu dengan memberikan pinjaman kredit kepada debitur. Dengan adanya pinjaman kredit Bank Mandiri mengharapkan laba atas pinjaman tersebut. Kredit di Bank Mandiri terbagi dalam beberapa segmen yang didasarkan pada limit pinjaman

Tabel 1.1 Segmen kredit di Bank Mandiri unit Regional Credit Operation

Segmen	Limit Pinjaman
SPK Corporate	> Rp. 300.000.000.000,00
SPK Commercial	s/d Rp. 300.000.000.000,00
SPK Small Business	s/d Rp. 10.000.000.000,00
SPK Mikro	s/d Rp. 200.000.000,00
SPK Consumer	Khusus untuk kredit rumah

Sumber : Data internal Bank Mandiri Credit Operation

Dari tabel 1.1 dapat dilihat SPK Corporate merupakan pinjaman dengan limit terbesar yaitu lebih dari Rp. 300.000.000.000 , dan SPK Micro merupakan limit terkecil yaitu sampai dengan Rp. 200.000.000 . Dari kelima segmen tersebut SPK Mikro merupakan segmen dengan NPL (*non Performing Loan*) terbesar diantara yang lainnya, dikarenakan dalam melakukan penagihan SPK Mikro seringkali mengalami kendala keterlambatan pembayaran dari waktu jatuh tempo, dan debitur tidak bisa membayar utang mereka baik semua ataupun sebagian. Jika dilihat dari jumlah debiturnya, SPK Mikro merupakan segmen dengan jumlah debitur terbanyak dan merupakan kredit yang sering mengalami keterlambatan dibandingkan dengan SPK yang lain. Dilihat dari banyaknya jumlah peminat SPK

Mikro berarti segmentasi SPK Mikro sangat penting bagi calon debitur yang membutuhkannya, jika terus terjadi keterlambatan pembayaran dan bahkan sampai tidak tertagih maka dana dari segmentasi SPK Mikro ini tidak bisa diputar kembali bagi calon debitur lain yang membutuhkannya.

(Dalam orang)

Tabel 1.2 Debitur SPK Mikro Bank Mandiri Credit Operation

Status	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Debitur	44259	51881	52162	72149	76426
Kol-1 (PL)	38033	42436	43094	59598	65606
Kol-2 (PL)	195	228	242	412	426
Kol-3 (NPL)	24	-	90	30	159
Kol-4 (NPL)	89	219	128	256	223
Kol-5 (NPL)	5918	8998	8608	11853	10012

Sumber : Data internal SPK Mikro Bank Mandiri Credit Operation

Dari tabel 1.2 dapat dilihat jumlah debitur SPK Mikro Bank Mandiri unit Regional Credit Operation mengalami kenaikan yang cukup *signifikand* dalam jangka waktu 2015 – 2016. Pada tahun 2015 jumlah debitur SPK Mikro sebanyak 44.259 orang, merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir, kemudian pada tahun 2019 merupakan jumlah debitur terbanyak dengan jumlah 76.426.

(Dalam jutaan rupiah)

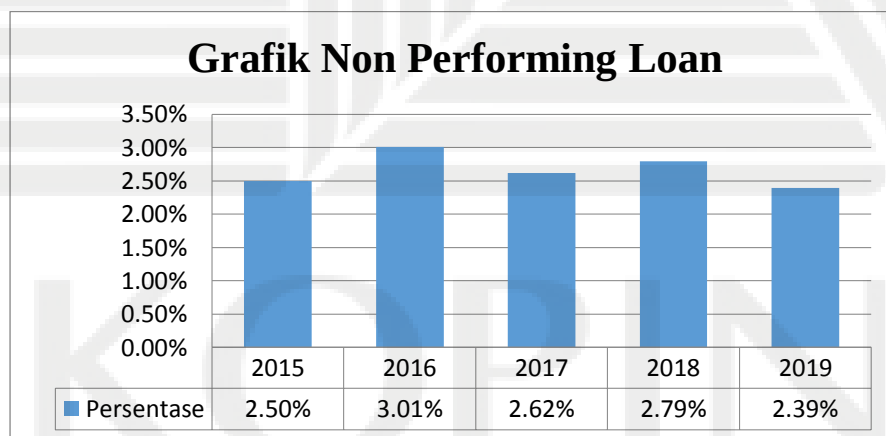
Tabel 1.3 Pembiayaan kredit bank Mandiri unit Regional Credit Operation

Status	2015	2016	2017	2018	2019
Kredit	Rp33,122,579	Rp38,196,626	Rp39,200,771	Rp45,216,000	Rp50,227,900
Kol-1 (PL)	Rp32,294,514	Rp37,046,907	Rp38,173,710	Rp43,954,473	Rp49,027,453
Kol-2 (PL)	Rp645,890	Rp740,938	Rp954,342	Rp2,417,496	Rp2,647,482
Kol-3 (NPL)	Rp41,403		Rp205,412	Rp63,076	Rp240,089
Kol-4 (NPL)	Rp124,209	Rp344,915	Rp154,059	Rp315,381	Rp300,111
Kol-5 (NPL)	Rp662,451	Rp804,802	Rp667,589	Rp883,068	Rp660,245

(Sumber :Data internal SPK Mikro Bank Mandiri Credit Operation Bandung)

Dari tabel 1.3 dapat dilihat pembiayaan kredit bank Mandiri Credit Operation mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam jangka waktu 2015 – 2019. Pada tahun 2015 pembiayaan kredit bank Mandiri Credit Operation sebesar 33 Triliyun rupiah, dan yang terbesar pada tahun 2019 sebesar 50 triliyun rupiah. Semakin besar dana yang disalurkan, maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh bank. Akan tetapi, resiko yang diterima bank pun akan semakin besar juga (Heriana 2010:5). Untuk itu bank perlu mengukur tingkat kelancaran pembayaran nasabahnya. Pembayaran kredit dapat diukur menurut kolektabilitasnya, yaitu lancar (*Performing Loan*) dan bermasalah (*non Performing Loan*) (Ismail 2010:210).

Kredit dikatakan *Performing Loan* apabila kualitas kredit nasabah lancar ataupun terjadi tunggakan sampai dengan 90 hari, dan apabila kualitas kredit nasabah terjadi tunggakan diatas 90 hari ataupun tidak bisa membayar dapat dikatakan bahwa kredit nasabah tersebut *non Performing Loan*(Ismail 2010:210).



Gambar 1.1 Tingkat *non Performing Loan* Bank Mandiri Credit Operation

Kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah rasio yang membandingkan antara total kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan dalam bentuk persentase. *Non Performing Loan* (NPL) dapat digunakan sebagai indikator risiko kredit, dimana semakin rendah tingkat rasio NPL, maka akan semakin rendah tingkat kredit bermasalah yang berarti semakin baik kondisi bank tersebut dan sebaliknya semakin tinggi tingkat rasio NPL, maka akan semakin besar risiko kredit yang ditanggung pihak bank (Andreani & Erick, 2016).

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa adanya Fluktuasi NPL Bank Mandiri dari tahun 2015 – 2019. Tahun 2016 merupakan NPL tertinggi Bank Mandiri dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebesar 3,01%, dan pada tahun 2019 merupakan yang terendah yaitu sebesar 2,39%. Meskipun pada tahun 2017 NPL bank mengalami penurunan, akan tetapi persentasenya masih lebih tinggi dari pada tahun 2015 yaitu 2,67%, dan pada tahun 2018 NPL Mandiri kembali mengalami kenaikan meskipun hanya sebesar 0,17%. Hal ini tak menutup kemungkinan untuk tahun tahun selanjutnya NPL bank Mandiri akan mengalami kenaikan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah seorang pegawai Bank Mandiri, faktor yang menyebabkan kredit macet adalah kurang baiknya pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak bank seperti kurang teliti dalam pemeriksaan agunan, adanya target yang harus dicapai oleh bisnis unit sehingga debitur yang meminjam bisa memperoleh dana meskipun tidak sesuai dengan nilai

agunan, agunan yang sudah kadaluarsa, dan agunan yang dijaminkan atas nama orang lain. Hal ini bisa menyebabkan debitur lepas dari tanggung jawabnya.

Berdasarkan penelitian dari Linda Sari (2014) yang berjudul Evaluasi pengendalian internal sistem pemberian kredit di Bank DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan Pengendalian internal yang sesuai dengan lima komponen COSO (Committee Of Sponsoring Organization) dan sangat menunjang dalam prosedur pemberian kredit. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Widiasmara (2014) yang berjudul Analisis pengendalian internal atas piutang untuk meminimalkan piutang usaha tak tertagih tertagih pada PT.OMF. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal atas piutang berpengaruh dalam meminimilasi jumlah piutang tak tertagih. Penelitian yang dilakukan oleh Ellis Kofi Akwa Sekyi (2015) yang berjudul Effect of internal controls on credit risk among listed Spanish. Hasil penelitian menunjukkan pengendalian internal yang dijalankan perusahaan sudah efektif. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Marvin Rini dan Hendrik (2017) yang berjudul Evaluasi Pengendalian Internal terhadap kredit diragukan pada PT Bank Salutgo. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan bank yang sudah cukup baik dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal sesuai dengan COSO. Penelitian lainnya dilakukan oleh Jati (2013) dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Non Performing loan. Hasil dari penelitian ini ternyata Sistem pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap non performing loan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Evaluasi Efektifitas Sistem Pengendalian Internal terhadap Kredit Mikro Bermasalah (Studi Kasus pada Bank Mandiri unit Regional Credit Operation Bandung)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terkait adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana standar Sistem Pengendalian Internal terhadap kredit bermasalah di Bank Mandiri unit Regional Credit Operation?
2. Bagaimana pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal terhadap kredit bermasalah di Bank Mandiri unit Regional Credit Operation?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal terhadap kredit bermasalah sudah diterapkan secara efektif di Bank Mandiri unit Regional Credit Operation?
4. Apakah sistem pengendalian internal terhadap kredit bermasalah di Bank Mandiri Credit Operation sudah sesuai dengan konsep pengendalian internal menurut COSO?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui standar Sistem Pengendalian Internal terhadap kredit bermasalah di Bank Mandiri unit Regional Credit Operation.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal terhadap kredit bermasalah di Bank Mandiri unit Regional Credit Operation.

3. Untuk mengetahui seberapa efektif Sistem Pengendalian Internal terhadap kredit bermasalah yang sudah diterapkan di Bank Mandiri unit Regional Credit Operation.
4. Untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Internal terhadap kredit bermasalah di Bank Mandiri unit Regional Credit Operation sudah sesuai dengan konsep sistem pengendalian internal menurut COSO dan apa yang harus diperbaiki.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Akuntansi di Institut Koperasi Indonesia, dan dengan adanya penelitian ini penulis bisa menambah wawasan dan pengetahuan.

1.4.2 Manfaat bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan mendapatkan informasi tentang tentang pengendalian Non Performing Loan, dan perusahaan bisa melakukan pengendalian Internal yang baik dalam melakukan penanganan untuk Kredit bermasalah (*Non Performing Loan*).

1.4.3 Manfaat bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan tentang bagaimana proses perkredit di perbankan, dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Mandiri Credit Operation, berlokasi di Jalan Asia Afrika No.61 Kota Bandung, Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
1	Tahap Pertama								
	a. Menyusun Usulan Penelitian	■	■	■					
	b. Seminar Usulan Penelitian			■	■				
	c. Perbaikan Usulan Penelitian				■	■			
2	Tahap Kedua								
	a. Penyebaran Kuesioner					■			
	b. Analisis Pengolahan Data					■			
	c. Penulisan Skripsi					■			
	d. Kolokium						■		
3	Tahap Ketiga								
	a. Bimbingan Akhir Skripsi						■		
	b. Perbaikan Skripsi						■		
	c. Sidang Skripsi						■	■	■

IKOPIN